

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Empiris Hukum/Perspektif Ilmu-Ilmu Perilaku Filsafat dan Praktek Psikologi Hukum dan Hukum Restoratif*, Jilid 1.

Abdul Latif, 2014, *Hukum Administarasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta,

Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

-----, 1986, *komentar terhadap putusan mahkamah agung republik Indonesia terbaru mengenai korupsi*, Jakarta, indo Hill.

Astrid Berg, *Implementing and Enforcing European Fisherias Law*, Kluwer Law, United Kingdom.

Bagir Manan, 2009, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung.

Bambang Waluyo, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, sinar Grafika, Jakarta.

Budi Parmono, 2011, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia : Disertasi*, Fakultas Hukum UB, Malang.

Budi Suhariyanto, 2015, *Titik Singgung Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat Pemerintah Dalam Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana*, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA, Jakarta.

Buchari Said H, 2000, *Sekilas Pandang Tentang Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.

C.F. Strong, *Modern Political Constitution*, 1963, London, Sidgwick and Jackson.

Disiplin. F. Manao, 2017, *Penyalahgunaan Wewenang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, CV. Kreasi Sahabat Bersama, Bandung.

Duff, R.A. and David Garland, 1994, *A Reader on Punishment*, University Press, Oxford.

Douglash Yrn, 1999, *Dictionary of Conflict Resolution, compiled and edited*,

Edi Setiadi dan Rena Yulisa, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Edwin W. Petterson, 1952, *Hans Kelsen and His Pure Theory of Law*, California Law Review, California.

Fajar Sugianto, 2014, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum*, Seri Kesatu, Edisi Revisi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

G.P Hoefnagels, 1973, *The other side of criminology: An inversion of the concept of crime*. Deventer, Holland: Kluwer.

H.L.A Hart, 1961, *The Concept of Law*, Oxford University Press.

H.Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*,sinar Grafika,Jakarta.

Herbert L. Packer, 1968, *The Limit of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.

Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Intercourse: Good Books, Pemsylvania.

Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana* , Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & rekan, Jakarta.

-----, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media. Jakarta.

Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

J.C. Oudijk Faure, 1994, *Kekhawatiran Masa Kini. Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

J.M.V Bemmelen, 1984, *Hukum pidana I: Hukum pidana materiel bagian umum*, Bina Cipta, Bandung..

Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jeremy Bentham, 2010, *Teori Perundang-undangan, Prinsip-Prinsip Hukum Perdata dan Hukum Pidana, (The Theory of Legislation)*, Diterjemahkan oleh Nurhadi, MA, Nusamedia, Bandung,

-----, 2000, *An Introduction to the Principle of Morals and Legislation*, Batoche Book, Kichener.

John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice*, Oxford University Press.

L. J. Van Apeldoorn, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Larry J. Siegel, 2009, *Essential of Criminal Justice*, Wadsworth Cengage Learning, Belmont, CA, USA.

M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

Marwan Effendy, 2013, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Refferensi (GP Group), Jakarta.

Mahrus Ali, 2013, *Membumikan Hukum Progresif*, Cetakan I, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Mariette Kobussen, 1991, *De Vrijheid Van De Overheid*, W.E.J Tjeenk Willink Zwolie, tanpa tepat, tanpa penerbit.

Markus D. Dubber, *Ultima Ratio as Caveat Dominus: Legal Principle, Police Maxims and Critical Analysis of Law*, Social Science Network, Jerman.

Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1995, *Bunga Rampai Korupsi Cet. Ke-3*, LP3ES, Jakarta.

Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1982, *Teori – teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Nur Basuki Minarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Palangkaraya.

-----, 2011, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Oznur Sevdiren, *Alternative to Imprisonment in England and Wales, Germany and Turkey*, A comparative study, Springer, London.

P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Philiphus M. Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang*, Yuridika.

-----, dkk, 2012, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta.

-----, 2012, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Paulus Effendi Lotulung, 2013, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta.

Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) , 2016., *Undang – undang Administrasi Pemerintahan Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Richard A. Posner, 2014, *Economics Analysis of Law*, Wolters Kluwer Law & Business, New York.

Ridwan HR, 2016, *Persinggungan Antar Bidang Hukum Dalam Perkara Korupsi*,
Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta.

-----, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada,
Depok.

Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi, Alihbahasa Hermoyo, Cet. Ke-2*
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, YLBHI,
Jakarta

SF.Marbun, 2014, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak*, FH UII Press,
Jogjakarta.

S.H. Alatas, 1986, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data
Kontemporer*, LP3ES, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Sheldon S. Stenberg dan David T. Austern, 1999, *Government, Ethics and
Manager; Penyelewengan Aparat Pemerintah*, Rosdakarya,
Bandung.

Sjahran Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi di
Indonesia*, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Hukum Sudarto FH UNDIP, Semarang.

-----, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty,
Jakarta.

-----, 2014, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Cahaya
Arma Pustaka.

Sugiyono, 1983, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfa Beta, Bandung.

Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

T. J. Gunawan, 2018, *Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*,
Edisi Revisi, Genta Publishing, Jakarta.

T Smollet, M.D, *The History of England, Volume First*, Oxford, Wiliam
Acckering, London.

Utrecht, 2000, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas,
Surabaya.

Utrecht, dan Djindang, disadur oleh Moh. Saleh, 2009, *Pengantar Hukum
Administrasi Negara*, Cet. Kesembilan, Ichtiar Baru, Jakarta.

W.L.G. Lemaire, 1995, *Het Recht In Indonesia*, Uitgeverij, Bandung.

Yulies Tiena Masrini, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zairin Harahap, 2008, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Raja
Grafindo Persada Jakarta.

Makalah dan Disertasi

Abdul Latif, 2015, *Penegakan Hukum Administrasi Pemerintahan dan Tindak Pidana Korupsi*, Orasi Ilmiah, Kampus UMI, Makassar.

Andi Hamzah, Makalah *Restorative Justice* dan Hukum Pidana, Seminar Ikahi, 25 April 2012.

Andi Nirwanto, 2015, *Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang – Undang Administrasi Pemerintahan)*, Makalah Hukum Semnas HUT IKAHI, Jakarta.

Cekli Setya Pratiwi dkk, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aupb) Hukum Administrasi Negara*, judicial sector support program center for international legal cooperation (CILC) Netherlands Embassy, Jakarta, tanpa tahun.

Dani Elpah, dkk, 2016, *Titik Singgung Kewenangan Antara PTUN dan Pengadilan Tipikor Dalam Menilai Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang*, *Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI*, Jakarta.

Dian Puji Simatupang (Pakar Hukum Universitas Indonesia), 2016, *Focuss Group Discussion*, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara

Dika Yudanto dan Nourma Dewi, 2016, *Sinkronisasi Undang-Undang Administrasi Pemerintah Dengan Undang-Undang Tindak Pidak Korupsi Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah di Indonesia*, *Jurnal Serambi Hukum*.

Laica Marzuki, 2017, *Menyoal Diskresi Yang Terpasung : Mengkritisi Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Jakarta.

Mahfud MD, “*Keniscayaan Reformasi Hukum: Upaya Menjaga Jati Diri dan Martabat Bangsa*”, Makalah dalam Konvensi Kampus VI dan Temu Tahunan XII Forum Rektor Indonesia (FRI) di Universitas Tanjungpura Pontianak, 9 Januari 2010.

Mahrus Ali, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Progresif : Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum. Vol. 14, No.2.

Muhammad Tabrani Mutalib, 2017, *Persinggungan Hukum Administrasi Dengan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate.

Muladi, Makalah *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana disampaikan dalam seminar IKAHI, tgl 25 April 2012.

Philipus M. Hadjon, 2014, *Tolok Ukur Keabsahan Tindak Pemerintahan dan Keputusan Tata Usaha Negara*, makalah disampaikan pada penyelenggaraan – House legal Training Hukum Administrasi dan PTUN.

Rimawan Pradiptyo, dkk, 2016, *Korupsi Struktural : Analisis Database Korupsi Versi 4 (2001 – 2015)*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis , Universitas Gajah Mada.

Romli Atmasasmita, 2016, *Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penyelenggaraan Negara : Suatu Catatan Krisis Atas UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dihubungkan dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, artikel ilmiah hukum, Jakarta.

Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan*,
Disertasi.

Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

Supandi, 2016, makalah berjudul : *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana)*, Jakarta.

Wahyu Agam, 2019, *Diskursus Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Bagian Dari Tindak Pidana Korupsi*, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Yenti Garnasih, 2008, *Ultimum Remedium*, Artikel Hukum, LBH Pers, Jakarta.

Yoserwan, 2018, *Laporan Penelitian Disertasi : Implementasi Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia*, Padang.

Yulius, 2015, *Menyelisik Makna Penyalahgunaan Wewenang dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan ditinjau dari optik Hermeneutika Hukum*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXI No. 360.

Yulius, 2015, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Jakarta.

Zudan Arif Fakrulloh, 2015, *Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan*, Seminar Nasional, HUT IKAHI Ke-62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta.

Kamus dan Ensiklopedia

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BP2B Kemendikbud), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.

Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing.

Ensiklopedi Hukum Islam, 2003, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

J.S. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Lukman Ali, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa PN. Balai Pustaka.

W. J. S. Poerwodarmito, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,

William Allan Neilson (editor in chief), *Webster's Third New Internasional Dictionary, Vol1.*

Website

<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5733f0ea01aea/mau-tahu-biaya-penanganan-perkara-korupsi-simak-angka-dan-masalahnya/>

<https://www.ptun-tanjungpinang.go.id/?p=2798>

<https://news.detik.com/berita/2873113/jalan-memutar-menjerat-koruptor-ptun-dulu-pidana-belakangan>

<https://nasional.kompas.com/read/2016/kpk.akan.gelar.kasus.hadi>

<http://hukumonline.com/berita/baca/01/05/2017/menguji-asas-ipresumptio-iustae-causa-i-di-lingkungan-tata-usaha-negara>

<http://acch.kpk.go.id>

https://www.kompasiana.com/rinto_simorangkir/5c53024012ae944e064826a2/membandingkan-pencapaian-pemberantasan-korupsi-arab-saudi-dan-indonesia

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17060/penerapan-iprejudicialgeschillidalam-perkara-publik-dan-privat>

Peraturan Perundang – undangan dan Putusan

Undang – Undang Dasar 1945;

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang –
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang – Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang –
undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang – Undang Nomor 24 / Prp / 1960 tanggal 9 Juni 1960 tentang Pengusutan,
Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Kepada Pejabat pemerintahan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/ PM/ 06/ 1957 tanggal 9 April 1957

Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor PRT/ Peperpu/ 013/
1958 tanggal 16 April 1958

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategi Nasional

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25 / PUU-XIV / 2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV / 2006

Putusan Mahkamah Agung Nomor 88K/ Kr/ 1969

Putusan Mahkamah Agung Nomor 77K/ Kr/ 1973

Putusan Mahkamah Agung Nomor 892K/ Pid/ 1983

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1340K/ Pid/ 1992

Putusan Mahkamah Agung Nomor 572K/ Pid/ 2003

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 979K/ Pid /2004

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2257K/ Pid/ 2006

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 742 K/ Pid/ 2007

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1702K / Pid.Sus / 2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1555 K / Pid.Sus / 2019

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 25/ PID / TPK / 2016 / PT.DKI

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 250 / P / PW / 2015 /

PTUN-JKT

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 15 / P / PW /

2016 / PTUN.PLK

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 2 / P / PW / 2017 /
PTUN.JBI

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 09 / P / PW / 2018 /
PTUN.Sby

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang Nomor: 24/Pid.Sus-
TPK/2014/PN Pdg

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu Nomor : 43 / Pid.Sus – TPK /
2015 / PN Pal

Putusan praperadilan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 01 / Pid.Prap / 2016 /
PN Bms tanggal 03 Februari 2016

